

Memorie van Toelichting

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

BUKU SATU

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memorie Van Toelichting

Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

BUKU SATU

Tim Penyusun: PPATK & Setjen DPR RI

Penerbit

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telp. 021-3850455, 3853922, Fax. 021-3856809, 3856826

website: <http://ppatk.go.id>

email: contact-us@ppatk.go.id

Disain & Tata Letak: Perpustakaan PPATK

Cetakan pertama, Juli 2011

ISBN 978-602-9285-00-0

978-602-9285-01-7

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

TIM PENYUSUN

Muhammad Yusuf
Edi Muhammad Yunus
Fithriadi Muslim
Listawati
Nuriani Intan
Affra Azzahra
Sutrisno Wibowo
Ferti Srikandini Sumanthi
I Gusti Mahardika
Yuliani
Yuda Sukarno
Lidya Suryani
Eka Martiana Wulamsah
Niken Paramita Purwanto
Muhamad Ikhwan Toni
Mas Riky Surya A.
Marno
Wanti Devi Setiawati
Mitra A.
Erna Agustina

PPATK & SETJEN DPR RI

PANITIA KERJA DPR-RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

PIMPINAN

- Ketua : H. HARRY WITJAKSONO, SH
No. Anggota 478, Fraksi Partai Demokrat
- Wakil Ketua : EDISON BETAUBUN, SH, MH
No. Anggota 260, Fraksi Partai Golongan Karya
- Wakil Ketua : H. IRSAL YUNUS, SE, MM
No. Anggota 331, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Wakil Ketua : H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, SH
No. Anggota 486, Fraksi Partai Amanat Nasional

ANGGOTA

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- I WAYAN GUNASTRA No. Anggota 538
ANDI RAHMAT, SE No. Anggota 552
DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, SH, LL.M No. Anggota 486
SUTJIPTO, SH, M. Kn No. Anggota 522

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

- DR. AZIZ SYAMSUDDIN No. Anggota 197
H. BAMBANG SOESATYO, SE, MBA No. Anggota 228
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH No. Anggota 245

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- ASDY NARANG, SH, M. COMM. LAW No. Anggota 400
IR. DOFIE OFP No. Anggota 399

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE No. Anggota 68
DRS. ADANG DARADJATUN No. Anggota 60

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- H. NASRULLAH, S. IP No. Anggota 119

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- AHMAD YANI, SH, MH No. Anggota 287

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- PROF. DRS. H. CECEP SYAIFUDDIN No. Anggota 151

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

- MARTIN HUTABARAT No. Anggota 18

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- H. SYARIFUDDIN SUDDING, SH, MH No. Anggota 16



SAMBUTAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau
Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia Nya telah terbit buku *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan dokumentasi dan informasi mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R.13/Pres/2/2010 pada tanggal 18 Februari 2010. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam Pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Sejak pertama kali dibahas dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 5 Mei 2010, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin di wujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan latar belakang, urgensi, dan tujuan yang diharapkan dalam penyusunan RUU ini. Salah satu tujuan penyusunan RUU dimaksud adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

Kepercayaan masyarakat tersebut di atas dapat tumbuh dengan adanya informasi yang jelas dan akuntabel mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang mendasari penegakan hukum dimaksud. *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum.

Buku Kompilasi Risalah atau *Memorie van Toelichting* (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan dokumentasi dan informasi mengenai proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR RI.

Buku MvT ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada kesempatan ini, sebagai wakil Pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif dan mendorong penyusunan buku MvT ini.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku *Memories van Toelichting* (MvT) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara lengkap menggambarkan proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku *Memorie van Toelichting* (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku MvT ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kerja keras dalam penyusunan buku MvT ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2011

**Menetri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,**





SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau
Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

A *Ihamdulillahi Robbil'alamin*, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Buku Kompilasi Risalah atau *Memorie van Toelichting* (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memperkaya dokumentasi dan sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai proses pembahasan RUU tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Buku MvT ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, mulai dari *copy* Surat Presiden RI Nomor: R-13/Pres/2/2010 mengenai penyampaian RUU tersebut kepada DPR, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hingga *copy* Surat Ketua DPR Nomor: LG.02.01/7352/DPR RI/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang ditujukan kepada Presiden RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Buku MvT ini juga memuat "record" atau risalah perdebatan "apa adanya" yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang ikut terlibat secara aktif dalam proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menganggap penting dan mendorong penyusunan buku MvT ini agar masyarakat dapat mempelajari dari sumber yang otentik dan menilai secara objektif proses pembahasan RUU yang cukup menarik perhatian besar



SAMBUTAN

KETUA PANSUS RUU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau
Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Saya menyambut baik penyusunan Buku Kompilasi Risalah atau *Memorie van Toelichting (MvT)* Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyusunan dan penerbitan buku ini akan memperkaya dokumentasi dan sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai proses pembahasan RUU tersebut di DPR. Buku MvT ini juga akan menjadi “catatan sejarah” dan dokumentasi bagi para anggota Pansus yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam pembentukan UU yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lebih daripada itu, masyarakat akan dapat menyimak dan mengetahui pembahasan dalam rapat-rapat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dari awal hingga akhir. Termasuk di dalamnya berbagai perdebatan, perbedaan pendapat hingga lahirnya kesepakatan atas RUU ini menjadi Undang Undang.

Bahwa RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan surat Presiden RI Nomor: R-13/Pres/2/2010 pada tanggal 18 Februari 2010, telah dibahas oleh sebuah Panitia Khusus (Pansus) DPR yang keanggotaannya berasal dari Komisi III (Bidang Hukum) dan Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR. Hal ini sejalan dengan keputusan Badan Musyawarah (BAMUS) DPR tanggal 25 Februari 2010.

Pansus mulai membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mulai pada bulan Mei 2010 dan secara intensif melakukan rapat-rapat baik dalam forum Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), maupun Tim Sinkronisasi (Timsin) pada bulan Juni hingga awal September 2010. Para anggota Pansus



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Faksimili +6221-3856826
Email : ppid@ppatk.go.id, Website : ppid.ppatk.go.id

Untuk selengkapnya, dapat di akses melalui
tautan berikut

[http://repositori.dpr.go.id/73/1/Memorie van to
echlichting buku 1.pdf](http://repositori.dpr.go.id/73/1/Memorie_van_to_echlichting_buku_1.pdf)